



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

e-klipping

Kumpulan Berita Harian Media Online

SUBJEK

EKONOMI

Senin, 18 Desember 2023

BIRO HUMAS, KEARSIPAN DAN TATA USAHA PIMPINAN
Perpustakaan
2023

Daftar Isi

1. TARGET SDGs “TANPA KELAPARAN” SULIT TERCAPAI – *Media Online Kompas*
2. EKONOMI “SAK MADYA” – *Media Online Kompas*
3. BANSOS MAKIN BESAR TANDA POPULASI MISKIN MASIH ADA – *Media Online Kontan*

KOMPAS

Senin

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

18 Desember 2023

Target SDGs "Tanpa Kelaparan" Sulit Tercapai

Bustanul Arifin

Guru Besar Universitas Lampung dan Ekonom Senior Indef

Target nomor 2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) "tanpa kelaparan" pada 2030 tampaknya sulit tercapai, baik di tingkat global maupun nasional.

Terlalu banyak hambatan yang menghalangi upaya pencapaian target sangat penting tersebut. Pandemi Covid-19 menjadi penyebab krisis ekonomi, krisis pangan dan energi global, apalagi faktor perubahan iklim, geopolitik dan geospasial telah memperumit keadaan.

Target nomor 2 "tanpa kelaparan" memiliki banyak komponen strategis: akses pangan, gizi kurang (*malnutrition*), produksi pangan, sistem produksi berkelanjutan, investasi dan pertanian, dan volatilitas harga.

Komitmen global

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada September 2023 menyebutkan, target *zero hunger* terasa semakin jauh. Lebih dari 600 juta penduduk global diproyeksi akan menderita kelaparan pada 2039 atau satu dari tiga orang akan menghadapi ketidaktahanan pangan (*food insecurity*).

Sekitar 3 miliar penduduk global tidak mampu memenuhi pangan sehat (*healthy diet*) sehingga target perbaikan akses pangan sulit tercapai.

Studi International Food Policy Research Institute (IFPRI) mencatat, pada 2023 terdapat 148 juta anak usia di bawah lima tahun (balita) menderita tengkes (*stunting*), 45 juta anak menderita kurus (*wasting*), dan 37 juta menderita kegemukan.

Studi itu menyebutkan, tak ada kemajuan sama sekali dalam penurunan anemia pada wanita rentang umur 15-40 tahun sehingga target penanggulangan gizi kurang sulit tercapai.

Angka prevalensi kurang gizi tingkat global memang kian membaik. Namun, prevalensi anemia pada wanita stagnan di angka 30 persen sehingga perlu upaya khusus mempercepat pe-

nanggulangan gizi kurang, baik di tingkat global, negara, maupun komunitas lokal.

Tiga komitmen global untuk mencapai target nomor 2 SDGs bisa diikhtisarkan sebagai berikut. Pertama, peningkatan investasi infrastruktur perdesaan, penelitian dan pengembangan (R&D) pertanian dan penyuluhan pertanian. Komitmen ini telah dilakukan. Anggaran R&D dan dukungan pertanian mulai meningkat walau masih terlalu kecil untuk melaksanakan intensifikasi berkelanjutan, khususnya di negara berkembang.

Total anggaran 800 miliar dolar AS per tahun di tingkat global untuk subsidi pertanian cenderung menciptakan distorsi baru, bahkan agak jauh dari pencapaian target nomor 2 SDGs.

Kedua, pengurangan hambatan dan distorsi perdagangan pada pasar produk pertanian. Fakta lapangan, hambatan perdagangan dan perlindungan harga di banyak negara justru menjadi penyebab kenaikan dan volatilitas harga pangan global.

Kebijakan larangan ekspor beras oleh India berdampak pada kenaikan harga beras global, hingga melampaui 600 dolar AS/ton, rekor tertinggi setelah krisis pangan 2008. Indonesia terkena dampak buruk strategi diplomasi negatif India karena harga beras rata-rata di pasar domestik telah melampaui Rp 14.600/kilogram, rekor psikologis, apalagi di tengah suasana politik dan perubahan iklim.

Ketiga, percdaman volatilitas harga pangan melalui sistem pasar komoditas pangan yang lebih beradab, fasilitasi akses informasi pasar secara cepat, termasuk cadangan pangan. Sistem Informasi Harga Pertanian (AMIS) yang dikembangkan G20 sebenarnya membantu memperbaiki informasi dan transparansi pasar pangan di tingkat global.

Akan tetapi, volatilitas harga pangan tetap tinggi, bahkan cenderung meningkat melebihi tren yang terjadi 10 tahun ter-

akhir. Tak ada suatu upaya bersama yang terintegrasi untuk mengelola cadangan pangan pokok, bahkan untuk tingkat Asia Tenggara (ASEAN) sekalipun.

Data cadangan pangan tidak lengkap, bahkan isu cadangan pangan pemerintah (*public stock holdings*) terus mewarnai perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Target SDGs Indonesia

Di Indonesia, ketahanan pangan masih sering dipersepsikan sempit sebagai swasembada pangan, atau lebih sempit lagi swasembada padi, jagung, dan kedelai (pajale). Dalam konteks target nomor 2 SDGs, komitmen yang dicanangkan Indonesia adalah ketahanan pangan dan gizi, setidaknya perbaikan kualitas pangan yang beragam, bergizi, sehat, dan aman (B2SA).

Namun, status ketahanan pangan Indonesia menurut Global Food Security Index (GFSI) 2022 masih di urutan ke-63 dari 113 negara, jauh di bawah Singapura (28), Malaysia (41), dan Vietnam (46).

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pencapaian kinerja target nomor 2 SDGs Indonesia. Misalnya, prevalensi penduduk rawan pangan sedang atau berat tahun 2022 masih 4,85 persen, dengan variasi lebar, dari 2,87 persen di Yogyakarta hingga 10,31 persen di Papua Barat.

Kita menghadapi persoalan serius beban gizi ganda (*double burden malnutrition/DBM*). Fenomena gizi kurang dan gizi lebih terjadi bersamaan, sebagai manifestasi perubahan sistem pangan, yang mengarah ke pangan olahan tak sehat dan supermurah. Masyarakat cenderung mengurangi aktivitas di kantor, rumah, dan jalan karena perubahan teknologi yang memanjakan tubuh, tanpa harus bergerak.

Jurnal bergensi bidang kesehatan masyarakat *The Lancet* (2020) menyebutkan, In-

donesia paling banyak mengalami DBM. Nyaris seluruh provinsi menderita balita tengkes dan dewasa 18 tahun gemuk. Bahkan, sekitar 68 persen penduduk tak mampu mengakses pangan sehat bergizi (*Kompas*, 9/12/2022).

Laporan *the Economist Intelligence Unit* tahun 2022 mencatat skor diversifikasi pangan Indonesia hanya 16,4 (pada skala 0-100) atau terendah di ASEAN, jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia (55,3), Thailand (47,8), dan Vietnam (37,3).

Menurut studi Herforth dkk (2022), harga rata-rata pangan sehat di Indonesia paling mahal, mencapai Rp 68.713 per hari, lebih tinggi dari di Thailand (Rp 66.407), Filipina (Rp 63.179), dan di Malaysia (Rp 54.417).

Amanat Konstitusi bahwa "pangan adalah hak asasi manusia sehingga kelaparan tidak dapat ditoleransi" masih jauh dari kenyataan. Permasalahan *stunting* bersifat multidimensional, tidak hanya kemiskinan dan akses pangan, tetapi juga pola asuh dan pemberian makan pada anak balita.

Berikut rekomendasi dan perubahan kebijakan yang perlu diambil pemerintah atau para calon pemimpin bangsa yang bertkontestasi di Pemilu 2024.

Pertama, pembangunan sistem pangan dan pertanian yang berdaya saing dan inovatif, alokasi anggaran R&D yang memadai untuk mengembangkan ekosistem inovasi melalui sinergi dan kemitraan pemerintah, dunia usaha, akademik, dan masyarakat madani.

Kedua, pengembangan pangan beragam, bergizi, sehat, aman (B2SA), dan terjangkau, mendorong diversifikasi, pangan fungsional berbasis potensi dan kearifan pangan lokal, kerja sama antardaerah (KAD), untuk mencapai kemandirian pangan secara bermartabat.

Ketiga, penguatan sistem dan

manajemen cadangan pangan di pusat, daerah, dan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi, skema kemitraan UMKM dengan usaha besar yang lebih beradab dan menguntungkan.

Keempat, pendampingan petani dalam manajemen usaha tani, intensifikasi yang lebih berkelanjutan, pertanian presisi, digitalisasi rantai nilai, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan rekayasa sosial dan kelembagaan, integrasi pengembangan manusia pertanian untuk meningkatkan inklusivitas dan kesejahteraan petani.

Hlm: 6 - Kolom: Opini

KOMPAS

Senin

AMANAT HATI NURANI RAKYAT

18 Desember 2023

Ekonomi "Sak Madya"

Masyarakat kelas menengah dan bawah tengah memasuki fase ekonomi cukup atau "sak madya". Pada fase ini, mereka akan semakin mengencangkan ikat pinggang.

Hendriyo Widi

Biaya hidup di Indonesia kian tinggi. Upah, gaji, atau penghasilan seakan tak mengejar lagi. Kondisi ini akan menempatkan kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia pada fase ekonomi cukup atau *sak madya*.

Saat ini kecemasan masyarakat Indonesia, terutama yang berpenghasilan menengah dan rendah, tengah bergeser dari pandemi Covid-19 ke biaya hidup. Biaya hidup di Indonesia semakin tinggi seiring kenaikan harga komoditas pangan dan nonpangan.

Dalam empat tahun terakhir (2018-2022), biaya hidup per bulan di 10 kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia naik di kisaran Rp 1 juta-Rp 1,5 juta. Sepuluh kota itu adalah DKI Jakarta, Bekasi, Surabaya, Depok, Makassar, Tangerang, Bogor, Kendari, Batam, dan Balikpapan.

Di Jakarta, misalnya. Hasil survei biaya hidup (SBH) 2022 menunjukkan, nilai konsumsi rata-rata atau biaya hidup rumah tangga per bulan di ibu kota Indonesia itu Rp 14,88 juta. Biaya hidup per bulan itu naik Rp 1,43 juta dibandingkan SBH 2018 yang sebesar Rp 13,45 juta per bulan. BPS

menghitung besaran biaya hidup berdasarkan pengeluaran konsumsi komoditas makanan dan nonmakanan pada setiap rumah tangga dengan jumlah anggota 2-6 orang.

Lima komoditas barang/jasa di Jakarta yang bobot nilai konsumsinya terbesar adalah tarif listrik (6,58 persen), kontrak rumah (5,56 persen), bensin (4,86 persen), sewa rumah (4,34 persen), dan nasi dengan lauk (2,67 persen). Dibanding SBH 2018, perubahan bobot nilai terbesar terjadi pada tarif listrik yang naik 2,6 basis poin, bensin 1,54 basis poin, dan nasi dengan lauk 0,98 basis poin.

Jika biaya hidup itu ditakar dengan upah minimum dan rata-rata upah/gaji pekerja formal di Jakarta saja, jelas besar pasak daripada tiang. Apalagi jika ditimbang dengan penghasilan pekerja di sektor informal. Per Agustus 2022, jumlah pekerja formal dan informal di DKI Jakarta masing-masing sebanyak 3,07 juta orang dan 1,79 juta orang.

Pada 2022, upah minimum dan rata-rata per bulan upah/gaji pekerja formal di DKI Jakarta masing-masing Rp 4,57 juta dan Rp 5,91 juta. Dalam empat tahun terakhir (2018-2022), upah minimum di Jakarta naik Rp 930.000

dan rerata bulanan upah atau gaji naik Rp 1,79 juta.

Memang terdapat jurang yang sangat lebar dari besaran biaya hidup dengan upah minimum dan rerata bulanan upah/gaji pekerja formal. Hal itu bisa disebabkan oleh sampel yang diambil BPS dalam SBH 2022. BPS memilih sampel rumah tangga dengan berbagai penghasilan atau tidak hanya dibatasi pada kedua jenis upah tersebut.

Terlepas dari itu, tahun lalu, daya beli masyarakat yang belum benar-benar pulih tertekan kenaikan biaya hidup. Kenaikan biaya hidup itu terus berlanjut dan menghantui pemulihan daya beli masyarakat pada tahun ini.

Kenaikan harga pangan pokok, seperti beras, gula pasir, cabai merah, dan cabai rawit, masih terjadi. Harga BBM bersubsidi yang sudah telanjur naik pada tahun lalu masih membebani pengeluaran transportasi masyarakat kendati kenaikan harganya tidak terlalu tecermin dalam inflasi.

"Sak madya"

Sejumlah beban pengeluaran masyarakat itu terindikasi dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat dan tergerusnya tabungan.

BPS mencatat, pada triwulan III-2023, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06 persen secara tahunan. Pertumbuhan itu melemah dibandingkan dengan triwulan III-2022 dan triwulan II-2023 yang masing-masing tumbuh 5,39 persen dan 5,22 persen.

Tabungan masyarakat menengah-bawah dengan saldo di bawah Rp 1 juta terus tergerus pada tahun ini, terutama sejak Lebaran dan tahun ajaran baru. Berdasarkan data Mandiri Spending Index (MSI), per November 2023, indeks tabungan masyarakat menengah-bawah sebesar 47,4, anjlok dari Juli 2023 yang sebesar 83. Indeks belanja mereka juga melambat meski masih tumbuh di level 269,2.

Kondisi tersebut membuat masyarakat, terutama kelas menengah dan bawah, memasuki fase ekonomi cukup atau *sak madya*. Mending budaya-budaya Radhar Panca Dahana dalam bukunya, *Ekonomi Cukup: Kritik Budaya pada Kapitalisme* (2015), menggambarkan ekonomi cukup sebagai bentuk kearifan lokal untuk melawan kapitalisme dan konsumerisme.

Ekonomi cukup ini disandingkan sebagai lawan ekonomi rakus. Cukup atau dalam

bahasa Jawa *sak madya* berarti tidak rakus atau berlebihan. Dalam konteks ekonomi, pengeluaran perorangan atau rumah tangga harus seukupnya sesuai kebutuhan.

Dalam fase ini, masyarakat akan semakin mengencangkan ikat pinggang dan menentukan prioritas dalam berbelanja. Beberapa upaya meretas pembengkakan biaya hidup juga dilakukan dengan berbagai strategi, praktik, dan tips hidup lebih efisien (*life hacks*).

Meski begitu, di antara mereka masih ada yang gali lubang tutup lubang untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Biaya-biaya tak terduga yang kerap muncul juga mau tidak mau diatasi dengan cara "pinjam seratus" atau menggadaikan barang.

Potret ekonomi masyarakat ini akan terus berlanjut apabila kenaikan harga barang dan jasa pokok tak kunjung dijinakkan dan pendapatan tidak berubah signifikan. Lagi-lagi Indonesia akan terus terjebak pada pertumbuhan ekonomi dan konsumsi rumah tangga di kisaran 5 persen. Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dan konsumsi rumah tangga pada 2024 akan tumbuh 4,7 persen-5,5 persen secara tahunan.

Bansos Makin Besar Tanda Populasi Miskin Masih Ada

Pemerintahan Jokowi mengucurkan anggaran perlindungan sosial hingga Rp 3.600 triliun

Siti Masitoh

JAKARTA. Program perlindungan sosial (perlinsos) menjadi salah satu andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam menjaga daya beli masyarakat. Tak heran, setiap tahun, anggaran perlinsos hampir selalu naik.

Pada era Jokowi, total anggaran perlinsos yang dikucurkan mencapai Rp 3.669,43 triliun sejak tahun 2015 hingga 2024 mendatang. Anggaran perlinsos era Jokowi adalah anggaran perlinsos yang me-

lalui belanja pemerintah pusat juga transfer ke daerah.

Dari anggaran itu, Jokowi menurunkan angka kemiskinan dari 2015 sebesar 11,13% menjadi 9,36% di 2023. Tahun depan, pemerintah optimistis kemiskinan kembali turun ke angka 6%-7%.

Sementara dari sisi jumlah, per Maret 2023, populasi penduduk miskin Indonesia sekitar 25,9 juta jiwa, turun dibanding tahun sebelumnya. Namun, angka itu masih di atas populasi penduduk miskin sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai 24,78 juta jiwa

pada per September 2019.

Sebagai perbandingan, di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), duit bantuan sosial (bansos) sejak 2004 hingga 2014 mencapai Rp 606 triliun yang berasal dari belanja pemerintah pusat.

Dari anggaran itu, era SBY menurunkan kemiskinan dari 16,66% pada 2004 menjadi 10,96% di 2014. Sementara rerata inflasi pada periode itu 7,48% dengan rerata pertumbuhan ekonomi 5,7%.

Sedangkan perlinsos era Jokowi dinilai efektif menekan inflasi. Rerata inflasi sela-

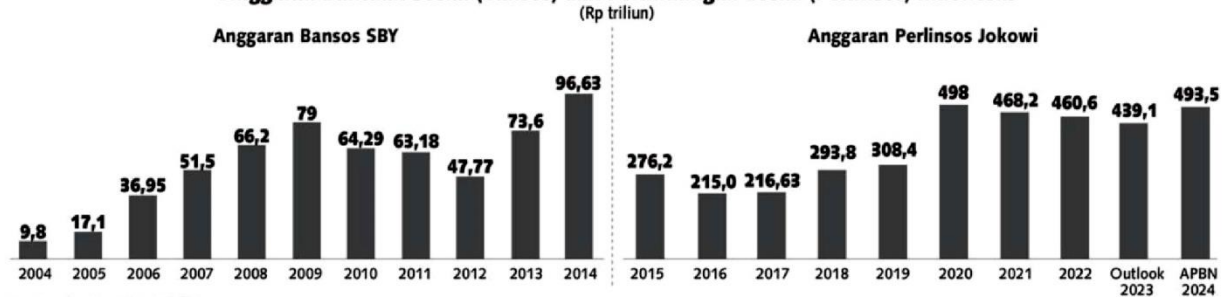
ma Jokowi menjabat sebagai Presiden mencapai 3,08%. Meski rerata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,13% atau lebih rendah ketimbang era SBY.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, program perlinsos era Jokowi lebih efektif lantaran program yang disalurkan lebih banyak. Hal ini sejalan pendapatan negara yang lebih besar saat era Jokowi dibanding SBY. Walaupun, "Memang tak bisa *vis a vis* soal penurunan kemiskinan karena ada faktor

naik turunnya harga pangan, krisis Covid-19 dan pengupahan yang mempengaruhi angka kemiskinan," kata Bhima.

Namun, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet bilang, pemerintah perlu meyakinkan masyarakat bahwa bansos di tahun pemilu tidak ada sangkut pautnya dengan politik. "Sehingga penting untuk mengawasi dan memastikan bansos yang disalurkan itu punya kecenderungan atau tendensi politik atau memang untuk menurunkan kemiskinan," kata dia.

Anggaran Bantuan Sosial (Bansos) dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) Indonesia



Sumber: Kemkeu, Riset KONTAN